

Struktur Pemberitaan Informasi Tenaga Kerja Indonesia dalam Media Online

Surwandono¹, Ety Siswati²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Email: surwandono@umy.ac.id

Abstrak

Keywords:

Tenaga Kerja
Indonesia, Dinamika
Pemberitaan, Media
Online

Artikel ini hendak menjelaskan tentang struktur pemerintahan informasi tenaga kerja Indonesia dalam media online. Terdapat sebuah asumsi besar bahwa struktur berita berhubungan erat dengan siapa yang berperan sebagai komunikator, dan kepada siapa berita tersebut akan disampaikan. Media online memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan informasi dibandingkan dengan media cetak maupun media visual dan audio visual. Artikel ini menemukan bahwa struktur pemberitaan tenaga kerja Indonesia sangat ditentukan oleh besaran dari struktur komunikator dari media online, semakin besar struktur komunikator dari media online akan memberitakan struktur pesan dalam pemberitaan yang lebih divergen, dan semakin kecil struktur komunikator dari media online akan memberikan informasi yang lebih konvergen.

1. PENDAHULUAN

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah julukan bagi mereka yang bekerja di luar negeri dengan berbagai profesi. Namun, di berbagai pemberitaan yang sering dimuat, TKI sering dikonotasikan ad mereka yg memiliki profesi informal di negara penerima. Aktifitas TKI menjadi sorotan publik karena selain sebagai penghasil devisa Indonesia juga diskriminasi yang dialami mereka. (google.co.id, 2007). Mulai dari perekrutan hingga pemulangan kembali ke Indonesia.

Kasus pelanggaran yang dialami para pahlawan devisa ini tidak pernah absen dalam pemberitaan media, baik cetak, elektronik maupun online. Media memuat berita diskriminasi yang dialami para TKI. Mulai dari penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan sampai hukuman mati di negara penerima. Media Massa menampilkan peristiwa dengan tujuan memberi gambaran kepada publik

mengenai keberadaan TKI serta permasalahan yang dihadapi. Setiap bulan pemberitaan TKI selalu ada di media massa.

Pemberitaan terkait TKI tidak hanya memuat tentang masalah diskriminasi. Keberhasilan dan aktivitas TKI yang bernilai positif kerap dimuat di media massa. Bagi media massa kasus pelanggaran HAM yang menimpa TKI penting untuk di muat. Karena selain menyangkut kepentingan warga negara Indonesia juga terdapat unsur nama baik bangsa. Walau pada akhirnya dalam pemberitaan setiap media memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu peristiwa atau berita.

Selain mengandung unsur layak berita, para pekerja migran ini mengisi *headlines* media bukan tanpa sebab. Pengawasan program pemerintah, keseriusan pemerintah dan keadilan dalam HAM para TKI bisa menjadi informasi khalayak. Hingga pada

akhirnya berbagai pemberitaan terkait dengan TKI mampu mengkonstruksi cara berpikir masyarakat Indonesia. Dapat terlihat dari sejumlah berita di mesin pencari web, jika setiap waktu pemberitaan TKI tidak pernah absen dalam pemberitaan media di Indonesia (google.co.id, 2017).

Selaras dengan kebutuhan masyarakat akan informasi cepat, media massa menggunakan perannya dalam menyajikan informasi, edukasi, opini, dan ilmu pengetahuan kepada pembacanya. Dengan alasan tersebut, media massa selalu aktif dalam memproduksi informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi; hangat, orisinal dan cepat. Seperti halnya pesan lewat lisan dan isyarat, media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi manusia. Hingga pada hakikatnya, media ada untuk meningkatkan kapasitas manusia dalam mengembangkan struktur sosialnya.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan struktur pemberitaan informasi Tenaga Kerja Indonesia adalah metode kualitatif. Dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Maliang, 2006). Sedangkan jenis penelitian untuk mengetahui struktur pemberitaan informasi TKI menggunakan Analisis Isi (*content Analysis*). Konten analisis digunakan untuk meneliti dokumentasi data berupa buku teks, essay, Koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.

Teknik sistematis ini digunakan untuk menganalisa isi pesan, mengolah pesan dengan cara mengobservasi hingga kemudian menganalisis perilaku komunikasi dari komunikator yang dipilih (Budd, 1967). Penelitian dengan menggunakan metode Analisis Isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi. Dengan penyampaian dalam bentuk lambang yang terdokumentasi.

Metode ini umumnya digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, aka diperoleh pemahaman terhadap berbagai peran komunikasi yang disampaikan oleh media massa, atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis dan relevan. Analisis isi tidak hanya sekedar menjadikan isi pesan sebagai obyeknya, melainkan melihat adanya konsepsi yang lebih baru tentang gejala simbolik dalam dunia komunikasi.

Selain itu, fokus dari analisis isi adalah konten actual dan fitur media. Hal tersebut digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks. Sedangkan teks dapat didefinisikan secara luas sebagai buku, bab buku, esai, wawancara, diskusi, tajuk berita dan artikel, surat kabar, dokumen sejarah, pidato, percakapan, iklan, atau dalam bentuk dokumen.

Untuk kebutuhan analisis teks diperlukan pengkodean tertentu terhadap isi teks. Kajian isi digunakan untuk menarik kesimpulan melalui karakteristik yang disampaikan oleh pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis (Komariah, 2009). Ada beberapa prosedur analisis yang harus dilakukan ketika melakukan riset menggunakan metode analisis isi. Pertama, peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai. Kedua, mendefinisikan istilah-istilah yang penting dan dijelaskan secara rinci. Ketiga, mengkhususkan unit yang akan dianalisis. Keempat, mencari data yang relevan. Kelima, membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan. Keenam, merencanakan penarikan sample. Ketujuh, merumuskan pengkodean kategori. Setelah itu, peneliti menentukan serinci mungkin aspek dari isi yang akan diteliti, salah satunya adalah merumuskan kategori yang relevan untuk diteliti (Wallen, 1992).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Struktur Komunikasi

Fakta dan detail tentang berbagai peristiwa yang berhubungan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) silih berganti disuguhkan oleh media massa di Indonesia. Pemberitaan tentang TKI menempati posisi yang istimewa di media, baik itu cetak, radio, televisi maupun online. Melalui media online, publik dengan mudah mengakses berita melalui mesin pencari web. Hampir tiap bulan dalam situs berita online selalu memuat tentang TKI.

Aktivitas TKI kerap ditampilkan dalam situs berita tersebut. Mulai dari pemberitaan positif maupun negatif. Namun, tidak dapat dipungkiri jika jumlah berita yang disajikan dalam mesin pencari web terus mengalami kenaikan setiap harinya. Setiap situs media online memberitakan tentang TKI dengan berbagai *angle*. Terutama kasus TKI di luar negeri yang tidak pernah absen dalam pemberitaan media.

Mulai dari gaji yang tidak dibayar, penipuan paspor hingga pinyaksan fisik yang berakhir dengan kematian. Hal ini menjadi menarik untuk diberitakan karena menyangkut kepentingan warga Indonesia sendiri dan pemerintah Indonesia (google.co.id, 2017). Namun tidak sedikit yang memuat tentang aktivitas positif para pendulang devisa ini (google.co.id, 2017)

Seringnya intensitas media massa terutama online menuliskan berita tentang Tenaga kerja Indonesia dilatar belakangi banyak faktor. Dalam sistem pemberitaan suatu berita menggunakan paradigma komunikasi seperti yang diungkapkan (Laswell, 1960), bahwa proses komunikasi terdapat unsur *Communicator* (komunikator), *Message*, *Media*, dan *receiver* (Komunikan). Oleh karena itu, komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung /tidak langsung dengan tujuan

memberikan effect kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator.

Paradigma komunikasi dalam pemberitaan tentang Tenaga Kerja Indonesia terbentuk melalui beberapa aspek seperti pemerintah, lembaga sosial masyarakat hingga respon masyarakat terhadap pemberitaan tersebut. Dalam sebuah berita, pesan yang disampaikan oleh media kepada masyarakat harus jelas. Menurut (Wahyuni, 2014) komunikasi massa yang mengandalkan media massa memiliki fungsi utama, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat luas termasuk persoalan konflik. Segala hal yang terkait dengan tenaga kerja Indonesia mendapat perhatian lebih oleh media. Dalam menyajikan realitas termasuk konflik, media berfungsi sebagai alat transformasi penyampaian ideologi media massa tersebut pada khalayak, dapat meredakan, memperuncing atau berusaha netral. Saat pengkonstruksian realitas, media massa menggunakan pilihan bahasa dan simbol.

Pilihan tersebut akan mempengaruhi makna suatu realitas dan secara sengaja atau tidak, ideologi hadir dalam sebuah realitas yang disajikan media. Menurut (Sobur, 2001), media adalah ruang di mana berbagai ideologi dipresentasikan. Ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, dan di sisi lain sebagai kontrol atas wacana publik. Efek dari ideologi media itu adalah menampilkan pesan dan realitas. Hasil konstruksi tersebut tampak seperti nyata, natural, dan benar. Pengertian tentang realitas tergantung pada bagaimana suatu fenomena ditandakan dan dimaknai.

Dengan demikian, media dapat menjadi sarana representasi ideologi dalam wacana publik tertentu. Media juga berperan menandakan realitas dalam pandangan tertentu dan menunjukkan bagaimana realitas dapat memberi makna dalam penyusunan fakta yang ada. Dalam bingkai pemberitaan tentang tenaga kerja Indonesia. Pemerintah

tetap berada dalam urutan tertinggi sebagai komunikator dalam pemberitaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tetap menduduki peringkat teratas sebagai komunikator. Dimana pemerintah mengatur dalam UU No.39 tahun 2004 tentang masalah penempatan dan perlindungan TKI.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan peran pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pihak berwenang dan mengawasi sejauh mana agen-agen dan badan hukum terkait yang bertugas menjamin kelangsungan hidup dan sebagai payung hukum bagi para TKI yang bekerja di luar negeri. Sejalan dengan keputusan pemerintah untuk memberlakukan regulasi bagi para TKI, media memuat berita segala aktivitas mereka baik di Indonesia maupun di negara penerima. Mulai dari problem ketenagakerjaan hingga masalah hukum.

Lebih dari 20 juta pemberitaan tentang TKI ada di halaman pertama mesin pencari web setiap harinya (google.co.id, 2007). Dari jutaan berita yang ada, sebagian besar memuat tentang tindakan pemerintah terhadap permasalahan yang dialami TKI (liputan6.com, 2007). Selebihnya adalah berita yang terbagi antara masalah hukum, kekerasan terhadap TKI hingga aktivitas kesuksesan mereka di negara penerima. Sejak dikeluarkan moratorium TKI pada tahun 2011, pemerintah mulai berbenah diri dalam mengurus TKI. Mulai dari permasalahan pengurusan, penempatan, pemulangan, pengelolaan hingga permasalahan hukum.

Walaupun pengelolaan TKI di Indonesia bermasalah, pemerintah berupaya melakukan perbaikan. Media sendiri memuat beberapa peristiwa terkait dengan pernyataan pemerintah dalam pengelolaan pahlawan devisa. Dari pemberitaan terkait aktivitas TKI bisa dilihat struktur komunikasi yang terbentuk. Melalui mesin pencari web, terlihat beberapa berita teratas terkait dengan

aktifitas para pekerja migran. Salah satunya adalah kewajiban TKI untuk mengikuti program perlindungan ketenaga kerjaan. Beberapa media online menempatkan pemberitaan upaya pemerintah memberikan perlindungan ketenagakerjaan sebagai *headlines* (www.liputan6.com, 2017)

Pemberitaan tersebut memuat tentang peluncuran program jaminan sosial oleh pemerintah untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Melalui struktur komunikasi, bisa dilihat jika Pemerintah berperan selaku penyampai berita. Sedangkan isi dari berita menjelaskan program pemerintah kebijakan pemerintah melalui kementerian tenaga kerja agar seluruh TKI wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti program perlindungan ketenagakerjaan yang diadakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Efek yang diakibatkan setelah pemberitaan pembuatan BPJS TKI oleh beberapa media terutama media online, sebanyak 7 ribuan TKI yang berada di negara penerima mendaftar keanggotaan (www.CNNIndonesia.com, 2017). Menilik dari kedua berita tersebut, proses komunikasi dalam sebuah pemberitaan sangat penting. Media selaku alat penyampai pesan memberikan dampak terhadap setiap kebijakan pemerintah terhadap warga negaranya. Kebijakan pemerintah terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mendapat perhatian khusus oleh media, khususnya media online. Selain karena *timing* berita dan peristiwa yang terjadi tidak berlangsung lama, khalayak lebih menyukai pemberitaan yang masih segar.

Proses hukum, penipuan dan buruknya pengelolaan terhadap para pahlawan devisa menempati urutan kedua setelah berita tentang TKI (www.google.co.id, 2017). namun tidak bisa dipungkiri jika keberadaan pemerintah selaku regulator ada dalam setiap pemberitaan yang bernada negatif. Salah satunya adalah kasus keberadaan TKI ilegal

di Malaysia. tidak dapat dipungkiri jika Malaysia merupakan negara kantong penerima TKI (www.bbc.com, 2017). Dari ratusan ribu berita yang tersebar di media online, penyampaian berita kepada khalayak cenderung memberitakan tentang perilaku TKI yang tidak melakukan prosedur penempatan secara legal.

Mengingat peliknya urusan administrasi dan dana yang dikeluarkan, banyak dari pekerja luar negeri ini memilih mengambil resiko hukum yang berat di negeri orang dibandingkan mengikuti aturan pemerintah untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri (www.bnptki.go.id, 2017).

3.2. Struktur Komunikator

Meskipun, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, ini bukanlah jaminan bahwa persoalan perlindungan tenaga kerja secara serta merta telah terpenuhi. Masih ada beberapa kendala yang masih melilit pelaksanaan perlindungan TKI di luar negeri.

Hal ini terlihat dari aktor yang paling sering dibicarakan dalam pemberitaan TKI. Pemerintah menduduki posisi teratas sebagai penyampai berita terhadap khalayak. sebanyak empat ratus ribuan berita tentang TKI terdapat unsur pemerintah. Sejatinya, Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini, Instansi yang melaksanakan pengawasan tersebut wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Menteri.

Beberapa berita tentang TKI juga diwarnai dengan kehadiran aktor non

pemerintah sebagai pengawas atas segala kebijakan pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan di luar negeri. Migrant CARE adalah NGO yang paling sering disebut dalam pemberitaan TKI. Pihaknya memberikan bantuan kepada para TKI terkait dengan advokasi dan pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan baik melalui pemerintah maupun di negara penerima. bahkan, sebagai lembaga non intervensi dalam perlindungan TKI, migrant CARE turut dalam menyuarakan hak dan kepentingan TKI. Karena seharusnya, perlindungan TKI diluar negeri tak lepas dan masa persiapan, penempatan, hingga purna kerja seorang TKI. Supaya penanganan perlindungan TKI dan pelaksanaan tugas ketenagakerjaan tersebut dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan hubungan koordinasi dan kerjasama fungsional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan seharusnya penanganan TKI bermasalah juga harus ditangani secara terpadu oleh pemerintah pusat, sedangkan di daerah transit ditangani oleh pemerintah kota setempat dan dikoordinir oleh pemerintah provinsi.

Dalam menjalankan misi kemanusiaannya Migrant CARE memegang prinsip mandiri dan memberikan prioritas kepada kasus yang paling mendesakmarabahaya. Tidak bermaksud sama sekali untuk membedakan kasus pekerja migran berdasarkan kebangsaan, ras, jenis kelamin, agama atau pendapat politik. Migrant CARE juga tidak membedakan TKI yang berdokumen ataupun tidak, selama bisa ditelusuri siapaagency di negara penempatan dan PJTKI yang mengirim kasus tersebut tetap akan berusaha diselesaikan meskipun memakan waktu yang cukup lama.

Migrant CARE juga tidak pernah berpihak pada stakeholder yang terlibat kasus yang menimpa TKI. Pada umumnya penyelesaian kasus perkara pasti ada perdebatan yang sangat pelik untuk mencari

siapa yang bersalah dan siapa yang harus bertanggung jawab dan harus condong kemana Migrant CARE dalam menangani kasus tersebut, sejauh ini Migrant CARE selalu mengutamakan kepentingan pekerja migran dalam mendapatkan hak-haknya.

Pihak penyalahur tenaga kerja ke luar negeri juga tidak luput dalam pemberitaan terkait dengan perlakuan dan aktivitas TKI di negara penerima. Kasus-kasus penyiksaan yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebetulnya tidak lepas dari longgarnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan Jasa Pengiriman TKI (PJTKI). Karena itu pemerintah mulai membenahi mekanisme pengawasan PJTKI guna memastikan perlindungan TKI saat bekerja di luar negeri. Jadi, pada dasarnya permasalahan yang terjadi pada TKI ini merupakan masalah bersama, baik itu dari masyarakat ataupun dari pemerintah harus bersama-sama bekerja sama dalam menanggulangi masalah ini, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik lagi. Dan juga diharapkan pemerintah bisa lebih serius mengamati berbagai macam masalah TKI ini. Sehingga TKI sebagai pahlawan devisa tidak hanya sebagai wacana saja.

Kendala pengawasan yang menghambat juga dapat disebabkan banyaknya PPPTKIS yang tidak berijin maupun yang ijin operasionalnya sudah kadaluarsa. PPTKIS yang tidak berijin tentunya akan lolos dari pengawasan pemerintah. Meskipun operasionalnya para PPTKIS ilegal ini akhirnya terendus oleh pemerintah, maka mereka para PPTKIS ilegal tersebut akan dengan cepat menghilang, sehingga jika ada permasalahan dengan para TKI, maka tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pada PPTKI ilegal karena sudah kabur.

Kendala yang turut mewarnai kelancaran penempatan TKI ke luar negeri adalah kendala adanya high cost (biaya tinggi) yang harus ditanggung oleh para calon TKI.

Banyaknya pungutan-pungutan tidak resmi tentunya akan membebani para calon TKI. Kendala berikutnya adalah ketentuan yang mensyaratkan calon TKI harus sudah berumur minimal 21 tahun bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan merupakan ketentuan yang kontraproduktif bagi calon TKI itu sendiri. Hal ini karena mayoritas usia potensial untuk TKI adalah pada usia 18 tahun keatas. Demikian pula secara sosiologis, bahwa banyak potensi calon TKI yang berumur 18 tahun keatas untuk berkehendak untuk memperoleh penghidupan dan penghasilan yang layak dengan bekerja sebagai TKI ke luar negeri. Sehingga jika para calon TKI yang berusia 18 tahun akan tetapi belum berusia 21 tahun dihalangi untuk bekerja sebagai TKI ke luar negeri, maka hal ini merupakan bentuk peniadaan hak dasar para pekerja tersebut.

Keberadaan BNP2TKI dalam pemberitaan di media online juga tidak jauh berbeda dengan pemerintah. badan yang sejak tahun 1999 ini mengurus tentang Tenaga Kerja di luar negeri banyak disorot oleh publik terkait dengan kebijakan dan tindakannya terhadap kasus para pahlawan devisa yang berada di luar negeri. pemerintah berusaha lebih merapikan lembaganya dalam urusan TKI. Selaras dengan hal tersebut dibentuklah Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing. Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden.

Berita tentang aktivitas asosiasi TKI juga dianggap tidak kalah pentingnya dengan kasus-kasus yang menimpa pekerja migran di luar negeri ini. Kesadaran para TKI terkait posisinya dalam ketenaga kerjaan di negara penerima membuat sebagian dari mereka berinisiatif mendirikan Asosiasi TKI. keberadaan asosiasi ini didukung oleh pemerintah karena membantu pemerintah memantau aktivitas TKI dan PJTKI ilegal.

3.3. Struktur Pesan (Analisis Tabel)

Pesan yang ditampilkan dari jutaan pemberitaan TKI sangat beragam. Ada dua bagian yang dapat ditangkap melalui pesan tersebut. yang pertama adalah pesan positif. Tidak semua aktivitas TKI menggambarkan pesan negatif. Banyak TKI berprestasi yang turut menjadi pemberitaan media Online. Sebanyak dua ratusan ribu media menuliskan tentang prestasi TKI dalam berbagai bidang. Bekerja di luar negeri tidak hanya memberikan keuntungan secara materi, mereka mendapatkan ilmu yang baru yang nantinya bisa di terapkan di kampung halaman mereka. selain itu, prestasi yang mereka bawa juga ikut mengharumkan negara juga keluarga.

Lain halnya dengan TKI sukses, berita tentang kesuksesan TKI paling banyak menghiasi media online di Indonesia. Tak ayal, hal ini mampu memicu masyarakat untuk memilih pergi ke luar negeri menjadi TKI dengan jalan ilegal sekalipun. Kesuksesan para TKI ini didukung oleh pengalaman kerja dan nominal yang mereka bawa pulang sebagai kompensasi kerja mereka di negara penerima. Tidak jauh berbeda dengan TKI sukses, jumlah berita tentang TKI Berhasil juga mencapai empat ratus ribu berita.

Faktor keberhasilan mereka banyak ditunjang dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki. semakin tinggi pendidikan dan banyaknya ketrampilan yang dia kuasai, maka ia akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan

keahliannya (www.kompas.com, 2017). Keberhasilan para TKI tidak hanya ketiak dia pulang membawa gaji yang banyak saja. Akan tetapi ukuran sosial dalam lingkungan masyarakat tempat dia tinggal akan berubah. masyarakat sekitar memberikan posisi sosial yang lebih baik kepada mereka yang pulang dengan membawa gaji besar dan cerita keberhasilan bekerja di luar negeri.

Tak dapat dipungkiri jika pemberitaan TKI paling besar berkuat tentang permasalahan dan berbagai hal negatif. keberadaan TKI ilegal dan segala permasalahan hukum yang menjerat mereka membuat media memuat tentang berita mereka. sebanyak lima ratus ribu berita bercerita tentang TKI Illegal. Mulai dari keberangkata hingga bermasalah dengan administrasi ketenaga kerjaan di negara penerima. mereka memilih jalur Illegal karena mereka merasa tidak mengeluarkan biaya banyak dan sifatnya fleksibel. Namun, banyak yang dirugikan ketika mereka melakukan jalur Illegal. salah satunya adalah terpaksa harus menjalani hukuman hingga tidak bisa mengajukan tuntutan apapun kepada majikan jika mereka mengalami ketidakadilan dalam pekerjaan mereka.

Menduduki peringkat kedua dalam penyampaian pesan pemberitaan TKI yang negatif adalah banyaknya pemberitaan tentang TKI bodoh. Munculnya pemberitaan tentang TKI Bodoh terkait dengan banyaknya para tenaga kerja luar negeri ini yang terjerat masalah hukum dan ketidakadilan yang dilakukan oleh majikannya sendiri. selain itu pula, mereka tidak mengikuti prosedur yang telah diberikan pemerintah. ditambah lagi banyaknya para TKI ini tidak memiliki ijazah resmi untuk digunakan dalam proses administrasi pendaftaran ketenagakerjaan.

3.4. Studi Kasus Media Online

Luasnya ketersediaan lapangan kerja dan tingkat upah di luar negeri menarik minat buruh migrant Indonesia (baik laki-laki maupun perempuan) untuk bekerja sebagai

tenaga kerja migrant di negara lain. Antusias mereka semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah selaku pembuat kebijakan mengeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan pelayanan para pekerja migran ini. Diantaranya adalah Undang – Undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.18/MEN/XII/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Namun, antusiasime para pahlawan devisa ini berbanding terbalik dengan kondisi di negara penerima. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia mengalami diskriminasi, mulai dari tindak kekerasan, pelecehan seksual hingga ancaman hukuman mati. Tenaga kerja Indonesia (TKI) dan segala permasalahan di negara penerima kerap menjadi bahan pemberitaan media massa di Indonesia. Walaupun pemerintah telah mengatur regulasi mulai dari pemberangkatan hingga sistem gaji yang diterima, tetap saja menuai permasalahan. Tak ayal, pemberitaan tentang konflik dan kekerasan TKI (Tenaga kerja Indonesia) disajikan oleh hampir semua media massa di Indonesia.

Setelah Orde Baru berganti reformasi, pers diberikan kebebasan penuh untuk memberikan informasi secara terbuka. Media massa baik cetak maupun online lebih bebas melaporkan peristiwa apapun melalui sudut pandang mana pun yang ingin dipilih oleh wartawan. Perubahan politik mendorong media massa ke dalam ruang gerak yang lebih luas, untuk menyampaikan fakta dan pandangan secara terbuka, berani, dan independen.

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat saat ini, dimanfaatkan oleh berbagai media massa dalam perannya menyampaikan informasi, edukasi, opini, dan ilmu pengetahuan kepada para pembacanya. Oleh karena itu, media massa umumnya selalu aktif dalam memproduksi informasi yang cepat, hangat dan orisinal. Isi media massa selalu dipengaruhi oleh ideologi wartawan dan ideologi media itu sendiri. Sengaja atau tidak, media massa membentuk realitas yang ada sesuai dengan tujuan media. Ideologi media massa melekat pada lembaga media massa dan arahnya ditentukan oleh karakteristik lembaga media sebagai industri atau media publik. Menurut Althusser (takwin, 2008), ideologi merupakan representasi pengalaman individu sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka ideologi media massa merupakan nilai-nilai yang berkembang sejak media massa tersebut didirikan. Oleh karena itu, media massa memiliki ideologi masing-masing yang dipercaya dapat menentukan arah dan tujuan pemberitaan sekaligus sebagai alat untuk berkompetisi dengan media lain. Jadi, media memiliki interpretasi tertentu dalam memaknai realitas.

Berita yang dihadirkan ke tengah masyarakat telah termuat ideologi suatu media. Namun ideologi yang dimasukkan ke dalam berita bersifat laten dan tersembunyi, sehingga khalayak yang terpengaruh tidak sadar bahwa mereka dipengaruhi oleh media. Akhirnya, media massa dengan ideologinya, dapat mempengaruhi pola pikir khalayak. Tidak dapat dipungkiri, konsep ideologi menjelaskan mengapa wartawan mengkonstruksi realitas sedemikian rupa. Setiap media massa mempengaruhi dan membentuk ideologi wartawannya. Wartawan memiliki nilai ideologi media tempat ia bekerja dan menghasilkan berita yang sesuai dengan keinginan redaksional media tersebut. Fakta yang muncul di media massa tidak selamanya ditulis apa adanya.

Ada fakta yang ditonjolkan, ada juga fakta yang disembunyikan bahkan tidak ditampilkan sama sekali. Fakta yang muncul di media massa tidak sepenuhnya sama dengan fakta yang sebenarnya. Fakta tersebut merupakan hasil rekonstruksi dan diolah para wartawan di ruang redaksi. Jadi, berita yang disajikan di media massa telah mengalami proses seleksi yang dilakukan oleh wartawan yang berada di ruang redaksi. Media massa merupakan agen pengkonstruksian sebuah realitas.

Komunikasi merupakan aspek yang fundamental dalam kehidupan manusia. Saat manusia saling berkomunikasi (baik dengan Bahasa verbal maupun non verbal yang menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati) terjadi proses pertukaran informasi dan penyesuaian diri manusia dengan situasinya.

Tempo.com mengangkat pemberitaan tentang Tenaga kerja Indonesia (TKI) sebanyak 88.000 berita sepanjang Agustus 2016 hingga Agustus 2017. Sedangkan *rappler.com* mengangkat 1.460 berita tentang TKI. *Tempo* yang terkenal karena pemberitaannya yang lugas memuat 3.817 berita tentang TKI.

Pemerintah dalam hal ini sebagai regulator mendominasi pemberitaan. Dalam pemberitaan beberapa media online, pemerintah adalah pihak yang paling sering memberikan pernyataan tentang permasalahan Tenaga Kerja Indonesia. Sebanyak 70.200 berita dari *Kompas.com* (sekitar 75% dari total berita tentang TKI) berisi tentang pernyataan pemerintah tentang Tenaga kerja Indonesia. Sisanya adalah pemberitaan yang dilakukan oleh lembaga hukum perlindungan TKI (sekitar 0,5%), media massa (0,3%) dan partai politik (15%). Lembaga hukum perlindungan TKI walau sering memberikan payung hukum terhadap para pahlawan devisa yang bermasalah di negeri penerima, ternyata jarang memberikan pernyataan di media.

Pembinggkai berita terhadap peran pemerintah selaku komunikator dalam berita tentang TKI, menunjukkan peranya sebagai regulator. Pemerintah juga memberikan perlindungan bagi para pahlawan devisa ini. Mengingat mereka memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada proses pembangunan di Indonesia. Hal ini terlihat dari cuplikan berita dari *kompas.com* yang diangkat pada 20 Maret 2017 tentang “Tindak Lanjut revisi UU Perlindungan TKI, Pemerintah Bentuk Badan Pelaksana Kebijakan”

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pembentukan badan pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Langkah ini diambil pemerintah untuk menindaklanjuti rencana revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPILN). Hal ini disampaikan Hanif setelah melakukan pertemuan bersama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/3/2017). "Kepala badan pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan TKI akan ditunjuk oleh Presiden serta bertanggung jawab penuh kepada Menaker," kata Hanif, melalui keterangan tertulisnya

Media online yang juga kerap memberitakan tentang Tenaga Kerja Indonesia, baik dari segi problematika maupun aktivitasnya adalah *Rappler.com*. Media yang mengemas berita dengan narasi kemanusiaan ini terkenal cukup memberikan perhatian terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Persoalan pemerintah dalam menangani Tenaga Kerja Indonesia juga kerap dijadikan *headline* pemberitaan. Cuplikan berita dari *Rappler.com* pada 9 Juli 2017 dengan judul “*Kemnaker Tingkatkan Perlindungan Terhadap TKP*”

JAKARTA, Indonesia —Meskipun TKI merupakan pahlawan devisa, namun

berbagai masalah seringkali menaungi mereka. Mulai dari siksaan majikan, hingga ancaman hukuman mati di negara orang. Pemerintah pun berupaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap mereka, terutama mereka yang berupaya pergi tanpa melalui prosedur resmi. “Kehadiran Satgas TKI non-prosedural merupakan ujung tombak di daerah dalam rangka kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Hery Sudarmanto pada Jumat, 7 Juni 2017 lalu di Jakarta. Kemnaker bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Deputy Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan BNP2TKI. Tugas Satuan tugas ini mengawasi pemberangkatan dan pemulangan TKI di berbagai wilayah Indonesia. Satgas diharapkan mampu melakukan pencegahan, penanganan, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang berusaha menyelundupkan TKI. Hery melanjutkan, semenjak dibentuk pada 2016 lalu, Satgas telah mencegah pemberangkatan 6.306 TKI non-prosedural, sebagian besar dari Jawa Timur...

Selain pemerintah, lembaga hukum perlindungan TKI kerap memberikan pernyataan terkait dengan isu tenaga kerja Indonesia. Lembaga hukum perlindungan TKI adalah komunikator terbanyak kedua dalam pemberitaan TKI. *Kompas.com* memuat sekitar 4400 berita (sekitar 1,5%) dari total berita di tentang TKI. Sedangkan *Tempo* memuat 139 berita (sekitar 1,3%) dan *Rappler.com* memuat 27 berita (sekitar 0,8%). Tidak bisa dipungkiri jika keberadaan TKI di negara penerima rentan akan diskriminasi. Oleh karena itu, lembaga hukum ini menyediakan perlindungan dan penyuluhan terkait dengan permasalahan hukum yang dialami TKI. Hal ini bisa dilihat dari salah satu cuplikan berita yang dimuat oleh *Tempo* pada 30 April 2017:

TEMPO.CO, Jakarta- [Lia Syantia](#), [TKI ilegal](#), lega dan bahagia bisa kembali ke

Indonesia. Selama 6 bulan perempuan 23 tahun itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi, merupakan keputusan keliru. Lia menyadari bahwa pemerintah telah menghentikan pengiriman TKI ke sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. “Saya dijanjikan kerja di Abu Dhabi tapi malah bekerja di Arab Saudi,” ucap Lia di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sabtu, 29 April 2017. Ia merasa bersyukur bisa pulang ke Indonesia karena ratusan rekannya masih terkatung-katung di Arab Saudi. Pengurus Solidaritas Perempuan Nindy Silvie menyebut Lia sebagai korban penempatan TKI ilegal. Lia, menurut Nindy, tidak mendapatkan informasi yang jelas ihwal pekerjaan yang akan dilakoninya di negara tujuan. Tak hanya itu, Lia juga mengalami perampasan dokumen saat bekerja di Arab Saudi. “Harusnya dokumen dipegang oleh buruh migrant,” ucap Nindy. Nindy menjelaskan, Lia hanya salah satu dari ratusan TKI yang menjadi korban perdagangan manusia. Maraknya TKI ilegal atau perdagangan manusia tidak lepas dari keputusan pemerintah yang melarang pengiriman TKI ke Timur Tengah. Aturan itu tertuang dalam Kepmenaker RI No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara Kawasan Timur Tengah. Sejak Kepmenaker itu keluar, kata Nindy, eskalasi pengiriman TKI ilegal meningkat. Terhitung pertengahan 2016 hingga April 2017, Solidaritas Perempuan mencatat 9 kasus TKI ilegal.

Bukan hanya pemerintah dan lembaga hukum perlindungan TKI yang turut mewarnai pemberitaan TKI. Namun, partai politik di Indonesia. Keberadaan partai politik terhadap permasalahan TKI bukan tanpa alasan. Walaupun jumlah berita yang dimuat tidak sebanyak pernyataan yang melibatkan pemerintah maupun lembaga hukum perlindungan TKI. *Kompas.com* memuat berita yang terkait dengan TKI sebanyak 15.300 (sekitar 15%), *Tempo* memuat sekitar 56 berita (sekitar 0,8%), dan *Rappler.com* memuat sekitar 21 berita (sekitar 0,02%). Situasi politik saat pemilihan

umum membuat partai politik turut serta dalam penyelesaian permasalahan TKI. Mobilisasi pemilih dan pencitraan untuk pemenangan pemilu merupakan salah satu alasan partai politik.

Melalui rasio jumlah yang ada, pemerintah adalah pihak yang paling sering memberikan pernyataan terkait dengan pemberitaan TKI. Namun, hal ini tidak sebanding dengan apa yang ada terjadi di lapangan. Seperti yang dimuat dalam media *Kompas.com* pada tanggal 1 Februari 2017 dengan judul "Pemerintah Diminta Serius Mendata TKI" :

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay Partoan menilai pemerintah belum serius mendata tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Hal itu, kata Saleh, terlihat saat dirinya menanyakan jumlah TKI di Malaysia kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid. "Masa saya tanya ke Pak Nusron jumlah TKI di Malaysia berapa, Pak Nusron jawabnya sekitar atau kurang lebih 750.000. Masa jumlah manusia sekitar, itu belum saya tanya berapa yang legal dan berapa yang ilegal," kata Saleh saat rapat bersama Tim Pengawas (Timwas) TKI dari DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017). "Masa nanti saya tanya ke Pak Dede Yusuf anak cucunya berapa jawabannya sekitar tiga atau sekitar lima, kan enggak bisa begitu," ujar Saleh. Menurut Saleh, hal itu juga menunjukkan pemerintah tidak serius dalam mendata manusia Indonesia. Padahal, kata Saleh, pemerintah sangat bersemangat jika menagih pajak dari setiap warga negaranya. "Giliran menagih bayaran ke warga negaranya sangat bersemangat. Yang tidak terdata mati-matian didata. Giliran mendata warga negaranya sendiri tidak serius. Kan tidak bisa seperti itu," tutur Saleh..

Pemberitaan TKI di media massa banyak mempengaruhi pembaca di Indonesia. Dalam hal ini media bukanlah sekedar saluran yang bebas, media juga

merupakan subjek yang mengkonstruksi realitas lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Media dipandang sebagai agen rekonstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Dalam pemberitaan tenaga kerja Indonesia, media membangun konstruksi sosial terhadap pejuang devisa tersebut. Opini publik yang ingin dibangun media adalah TKI yang berada di luar negeri selain menghasilkan devisa buat negara, mereka pihak yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Terkait dengan idelogi media, situs *kompas.com* melakukan pembingkai berita yang berusaha mengedepankan objektivitas dalam pemberitaannya. Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh media *Tempo* dan *Rappler.com* kedua media ini juga mengedepankan aspek objektivitas dan lugas dalam pemberitannya. Tenaga kerja Indonesia memang layak untuk menjadi sorotan dalam media. Karena unsur pemberitaan yang terkandung didalamnya memenuhi syarat berita.

Mulai dari permasalahan pada saat mengurus keberangkatan hingga aktivitas di negara penerima. Pemerintah jelas merupakan faktor komunikasi terbanyak dalam setiap pemberitaan TKI. Selain fungsi mengayomi dan melayani masyarakat, jaminan hak asasi manusia dan keselamatan para TKI menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak sedikit program dan kerjasama yang dilakukan pemerintah demi teraturnya proses menjadi tenaga kerja Indonesia. Namun, media massa di Indonesia lebih banyak memuat berita tentang korban dan diskriminasi yang dialami oleh pahlawan devisa ini.

4. KESIMPULAN

Besaran struktur komunikator yang direpresentasikan oleh media online memberikan pengaruh yang luas terhadap pemilihan issue khusus yang akan diberitakan dalam issue TKI. Media online dengan ukuran

yang besar cenderung akan memberikan struktur pemberitaan yang divergen, sebagai akibat dari berjalannya mekanisme framing dari media online. Sedangkan struktur media online dengan besaran yang medium cenderung memberikan struktur pemberitaan TKI dalam konteks yang konvergen terkait dengan rendahnya proses framing di dalamnya.

REFERENSI

- Budd, R. w. (1967). *Content Analysis of Communications*. Macmillan.
- google.co.id. (2007, 08 30). Retrieved from https://www.google.co.id/search?q=TKI+sumbang+devisa+negara+2016&oq=TKI+sumbang+devisa+negara+2016&gs_l=psy-ab.3...151269.161595.0.162096.30.30.0.0.0.167.3207.5j23.28.0...0...1.1.64.psy-ab..2.27.3079...0j0i67k1j0i10k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j0i13i30k1j3
- google.co.id. (2007, 09 2). Retrieved from https://www.google.co.id/search?q=TKI&oq=TKI&gs_l=psy-ab.3...201094.210622.0.211619.32.19.4.0.0.0.338.1320.1j2j1j2.6.0...0...1.1.64.psy-ab..22.10.1378...0.5NH3FSocHpw
- google.co.id. (2017, 08 30). Retrieved from https://www.google.co.id/search?q=TKI&oq=TKI&gs_l=psy-ab.3..0i67k1i2j0i2.5256500.5258445.0.5259573.5.5.0.0.0.402.402.4-1.1.0...0...1.1.64.psy-ab..4.1.401.OWY8FbatNEo
- google.co.id. (2017, 08 31). Retrieved from https://www.google.co.id/search?biw=1280&bih=689&q=kasus+tki&oq=kasus+tki&gs_l=psy-ab.3..0i4.2728953.2732289.0.2732761.9.9.0.0.0.189.1262.0j8.8.0...0...1.1.64.psy-ab..1.8.1257...0i67k1j0i131k1.VS9WsqT9fWw
- google.co.id. (2017, 08 31). Retrieved from https://www.google.co.id/search?biw=1280&bih=689&q=aktivitas+tki&oq=aktivitas+tki&gs_l=psy-ab.3...6431.10405.0.10915.13.13.0.0.0.178.2098.0j13.13.0...0...1.1.64.psy-ab..0.12.1914...0j0i131k1j0i67k1j0i22i30k1.R4vE8B82nfM
- Komariah, D. S. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. alfabeta.
- Laswell, H. D. (1960). *The Structure and Function of Communication in Society*. New York: Harper.
- liputan6.com. (2007, 09 2). Retrieved from <http://www.liputan6.com/tag/tki>
- Maliong, I. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Takwin, B. (2008). *Akar-akar Ideologi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wahyuni, I. N. (2014). *Komunikasi Massa*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Wallen, J. R. (1992). *How to Design and Evaluate Research in Education*. McGraw-Hill.
- www.bbc.com. (2017, 09 6). Retrieved from <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40482368>
- www.bnptki.go.id. (2017, 09 6). Retrieved from <http://www.bnptki.go.id/read/12231/Prosedur-Penempatan-TKI-Hadir-untuk-Melindungi>
- www.CNNIndonesia.com. (2017, 09 06). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170806172105-92-232812/sebanyak-7500-tki-mendaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan/>
- www.google.co.id. (2017, 9 6). Retrieved from https://www.google.co.id/search?q=tki+indonesia&oq=tki+indonesia&gs_l=psy-ab.3..0i4.558692.563044.0.563406.15.14.1.0.0.0.250.2061.0j11j2.13.0..2..0...1.1.64.psy-ab..1.14.2070...0i131k1j0i13k1.Fow5wRQcaxk
- www.kompas.com. (2017, 09 6). Retrieved from <http://internasional.kompas.com/read/2010/12/16/21192145/Lebih.Banyak.TKI.yang.Berhasil>
- www.liputan6.com. (2017, 09 03). Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/3041039/tki-kini-dapat-perlindungan-jaminan-sosial>